

**UPAYA DAN STRATEGI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI
DALAM MENJAGA STABILITAS DI DAERAH
GUNA MENDUKUNG SUKSES PILKADA 2018**

RAPAT KOORDINASI

RABU, 7 MARET 2018

KONFLIK DI INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR :

- ◆ **IDEOLOGIS**
PERSOALAN RUMAH IBADAH DAN PERBEDAAN MAZHAB (SUNNI VS SYIAH, DAN AHMADIYAH)
- ◆ **POLITIS**
GESEKAN ANTAR PENDUKUNG CALON KEPALA DAERAH
- ◆ **SOSIO EKONOMI**
SENGKETA LAHAN, PEREBUTAN AREAL PERTAMBANGAN, WILAYAH PENANGKAPAN IKAN LAUT, DAN PEREBUTAN SUMBER EKONOMI LAINNYA
- ◆ **BUDAYA**
KONFLIK ANTAR SUKU ATAU ADAT
- ◆ **PERMASALAHAN SEPELE**
KESALAHPAHAMAN, SOLIDARITAS KEKERABATAN, DAN PREMANISME



TAHUN POLITIK 2018

TAHUN 2018 MERUPAKAN TAHUN POLITIK YANG DITANDAI DENGAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK PADA 171 DAERAH PADA 27 JUNI 2018

BEBERAPA POTENSI ANCAMAN YANG RENTAN MEMPENGARUHI TERJADINYA KONFLIK :

- BENTURAN ANTAR PENDUKUNG PASLON
- PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS
- KAMPANYE PROVOKATIF
- SENGKETA PILKADA
- PASLON TUNGGAL
- DAERAH YANG HANYA MEMILIKI 2 PASLON
- KESALAHAN PENGHITUNGAN HASIL SUARA
- POLITIK UANG
- NETRALITAS TNI-POLRI, ASN, DAN PENYELENGGARA PILKADA



MASA KAMPANYE PILKADA SERENTAK 2018

KEJADIAN YANG DAPAT MEMICU KONFLIK LANJUTAN ANTAR PENDUKUNG :

- DI KAB. KERINCI, **JAMBI** (28 FEBRUARI 2018)
- DI KAB. LUWU, **SULSEL** (24 FEBRUARI 2018)
- DI KAB. EMPAT LAWANG, **SUMSEL** DAN KAB. ENREKANG, **SULSEL** (18 FEBRUARI 2018)
- DI KAB. BONE, **SULSEL** (19 FEBRUARI 2018)

KAMPANYE PROVOKATIF (BLACK CAMPAIGN)

DAPAT MEMICU BENTURAN DI TATARAN GRASS ROOTS, ANTARA LAIN KOTA SAMARINDA (**KALTIM**), KOTA MEDAN, KAB. SIMALUNGUN, KAB. DELI SERDANG (**SUMUT**), KAB. ENREKANG (**SULSEL**), KAB. BANGKALAN (**JATIM**), KOTA BANDUNG (**JABAR**), KOTA PALANGKA RAYA (**KALTENG**), DAN **JATENG**

PENGUNAAN POLITIK IDENTITAS

- DI KOTA TEBING TINGGI, **SUMBAR**
- DI KAB. PADANG LAWAS, **SUMUT**
- DI **JABAR**
- DI KOTA BANDAR LAMPUNG, **LAMPUNG**
- DI KAB. SINTANG, **KALBAR**
- DI **BALI**

PENANGANAN KONFLIK

MELIPUTI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DENGAN MELIBATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT

➤ TAHAP PENCEGAHAN KONFLIK

Upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun system peringatan dini.

➤ TAHAP PENANGANAN KONFLIK

Upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengurangan dan penggunaan kekuatan TNI.

➤ TAHAP PASCA KONFLIK

Pemulihan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur serta upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi

UPAYA PEMERINTAH

PEMERINTAH TELAH MEMPERKUAT REGULASI UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL, DENGAN MENERBITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



TATARAN TEKNIS

PEMERINTAH TELAH MENERBITKAN PP NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. SELAIN ITU TELAH DITERBITKAN PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.



HAMBATAN

- ❖ MASIH RENDAHNYA KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT.
- ❖ KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SETEMPAT YANG KENTAL DENGAN PRIMORDIALISME.
- ❖ JUMLAH APARAT KEAMANAN YANG TERBATAS.
- ❖ KONDISI GEOGRAFIS YANG SULIT DIJANGKAU DITEMPAT TERJADINYA KONFLIK.
- ❖ KURANG CEPATNYA PEMDA MERESPONS MUNCULNYA PERMASALAHAN YANG MEMICU TERJADINYA KONFLIK.
- ❖ KURANG DIPEDOMANINYA UU PENANGANAN KONFLIK OLEH PEMDA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK YANG TERJADI.

LANGKAH-LANGKAH BIN

SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA SEPerti YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA, BIN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI DAN MEMBERIKAN PERINGATAN DINI TERHADAP SETIAP INDIKASI ATAS POTENSI KONFLIK SOSIAL

- MEMBENTUK SATGAS INTELIJEN TERPADU PAM PILKADA SERENTAK 2018 YANG MELIBATKAN SELURUH UNSUR K/L**
- BANTUAN PENGAMANAN DENGAN MENGERAHKAN PERSONEL DAN PERALATAN TEKNOLOGI INTELIJEN TACTICAL**
- MELAKUKAN OPERASI INTELIJEN DALAM RANGKA PENEBALAN WAWASAN KEBANGSAAN**
- BERKOORDINASI DENGAN TIM CYBER DARI BERBAGAI K/L**
- MEYAKINKAN SELURUH COUNTER PART ASING DI INDONESIA BAHWA SITUASI KEAMANAN PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TETAP KONDUSIF**

**ANCAMAN TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2018 DAN PEMILU 2019
TIDAK DAPAT DITANGANI SECARA SEKTORAL OLEH SATU LEMBAGA SAJA,
SEHINGGA PERLU DILAKUKAN SECARA KOORDINATIF DAN SINERGIS ANTAR
SELURUH PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA DAN APARAT KEAMANAN SECARA
KESELURUHAN**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH